

# PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN ORGANISASI, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

**Kartika Restu Aprilya**

*kartikack21@gmail.com*

**Astri Fitria**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

## ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of the competence of village fund management apparatus, organizational commitment, transparency, community participation on the village fund management accountability of Gresik. The research was quantitative. While, the data were primary. Moreover, the instrument in data collection technique used questionnaires, which were distributed to village of Benjeng District, Gresik. In line with, there were 100 respondents as sample. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 23. The research result concluded the competence apparatus had positive effect on the accountability of village fund management. This happened as the management of government finances needed competent human resource, which had sufficient capability and knowledge in managing funds. Likewise, organizational commitment had positive effect on the accountability of village fund management. It occurred since person who committed to work would have more responsibilities on his/her duties. On the other hand, transparency didn't affect the accountability of the village fund management. This meant, since there was no disclosure of government information, there would be no trust from the public on the government. Likewise, community participation didn't affect the accountability of village fund management. In other words, public was less involved within information from the government.*

*Keywords: competence, commitment, transparency, participation, accountability.*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dari penelitian ini dengan memanfaatkan data primer yaitu menyebar kuesioner kepada aparatur desa di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dalam pengelolaan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dana. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena seorang yang komit dalam melakukan pekerjaannya maka akan memiliki tanggungjawab lebih terhadap tugasnya. Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dengan tidak adanya keterbukaan terhadap informasi pemerintah maka tidak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena masyarakat kurang keterlibatan dalam informasi dari pemerintah.

Kata kunci: kompetensi, komitmen, transparansi, partisipasi, akuntabilitas.

## PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin lama semakin berkembang pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi terhadap pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan

dorongan pemerintah daerah untuk lebih mendorong masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya dari desa sendiri maupun dari luar. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menangani kegiatan di daerah tertentu berdasarkan asas otonom. Desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh kepala desa. Desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik (Nadir, 2013).

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintah seperti transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Salah satu yang diberikan pemerintah terhadap desa adalah alokasi dana desa (ADD). ADD merupakan anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 1.191,25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 18 kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Sejauh ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. "Sejak adanya dana desa, ternyata desa mampu membangun infrastruktur desa secara masif dan diakui badan dunia. Pembangunan akan terus ditingkatkan dan selama 5 tahun yang akan datang, dana desa bisa ditingkatkan dengan total Rp 400 triliun," kata Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) di Jakarta, Selasa (26/2/2019). Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula 77% dibagi rata ke seluruh desa. Kemudian 20% dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, dan luas wilayah. Kemudian, 3% dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal, (Sumber: kompas.com).

Penghimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Gresik memberikan perhatian terhadap banyaknya kades Gresik yang terjerat kasus hukum, karena kurang pemahannya mereka dalam penggunaan dana bantuan. Baik itu bersifat khusus (BKK) maupun bersifat umum (BKU) bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). "Fenomena ini tak bisa dibiarkan. Kepala desa harus ada pendampingan hukum. Kalau tidak, kades yang terjerat hukum akan terus berjatuhannya," ujar Kukuh Pramono Budi (Ketua DPC Peradi Kabupaten Gresik), Jumat (21/6/2019). Menurut Kukuh, peradi Gresik sudah pernah menyampaikan kepada kepala desa soal resistensi hukum bagi para kepala desa yang mendapatkan BKK jika mereka tak memiliki pemahaman hukum dengan baik. Ia mencontohkan pelaksanaan dana desa (DD) yang mana tiap tahunnya digelontorkan anggaran miliaran rupiah. "Saya sudah pernah sampaikan lama saat didengungkan dana desa. DD ini telah banyak memakan korban kades yang tak paham pelaksanaannya. Kalau kades tidak diadvokasi hukumnya dengan baik, maka korban akan berjatuhannya," ujar dia. Terlebih dalam waktu dekat ini tepatnya pada tanggal 31 Juli 2019, ada 256 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Tak menutup kemungkinan, kades yang terpilih nanti banyak didominasi oleh wajah baru yang masih

awam dalam tata kelola pemerintahan desa dengan baik. Terlebih, dalam memahami peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan (Gresik, bangsaonline.com).

Pengalokasian dana desa setiap desa berbeda-beda ditinjau dari beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan. Tujuan utama dalam pengalokasian dana desa adalah untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat supaya lebih maju. Oleh sebab itu perlu diketahui sejauh mana kompetensi apatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan inti dari permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## TINJAUAN TEORITIS

### **Teori Stewardship**

Menurut Perdana (2018) dalam Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manager tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya.

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

*Agency Theory* berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *prinsipal* (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektivitas pengelolaan dana desa yang terjadi (Putra dan Rasmini, 2019).

### **Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program pemerintah lebih cepat tersampaikan. Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa alokasi dana desa (ADD).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (1-2), yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintahan desa merupakan kepala desa yang dibantu perangkat desa atau aparatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan aparatur desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

### **Kompetensi Aparatur**

Kompetensi adalah faktor yang bisa mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas dibutuhkan adanya kompetensi. Menurut Hevesi (2005) kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Tingkatan kompetensi dapat dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan, serta keterampilan yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Sumber daya manusia bisa mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam suatu organisasi, seperti yang dikemukakan oleh, Mathis dan Jacson (2002) yang menyebutkan bahwa nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia ketika melakukan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka. Aparatur pemerintah harus mempunyai hal-hal yang disebutkan di atas supaya memiliki sumber daya yang baik dan tepat dalam mengelola dana desa supaya sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

### **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi sangat berkaitan dengan akuntabilitas. Komitmen terhadap organisasi merupakan suatu dimensi perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan kekuatan pada karyawan untuk bertahan pada suatu perusahaan. Untuk membuat karyawan agar memiliki komitmen yang tinggi adalah sangat penting, terutama pada perusahaan non profit yang skala gajinya tidak kompetitif. Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerja, sehingga mempunyai rasa tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya dan kinerjanya yang meningkat (Zeyn, 2011).

### **Transparansi**

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh suatu pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2002). Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat berhak tahu tentang proses anggaran yang menyangkut kepentingan dana aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintah memberikan pengaruh yang baik dalam mewujudkan indikator lainnya. Tanpa adanya keterbukaan dan perlibatan publik sebagai suatu jejaring dalam pengambilan keputusan pengambilan kebijakan di daerah hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korup dan lemah dari sisi akuntabilitas. Jadi perlu adanya sinergi keterbukaan, kejujuran dan agar tata kelola dalam mengambil keputusan tepat dan akurat.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat penting bagi instansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat dalam berinteraksi sosial dalam situasi tertentu (Wazir, 1999). Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan masyarakat terlibat dalam ke ikut serta pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mencari solusi paling alternatif dalam menangani

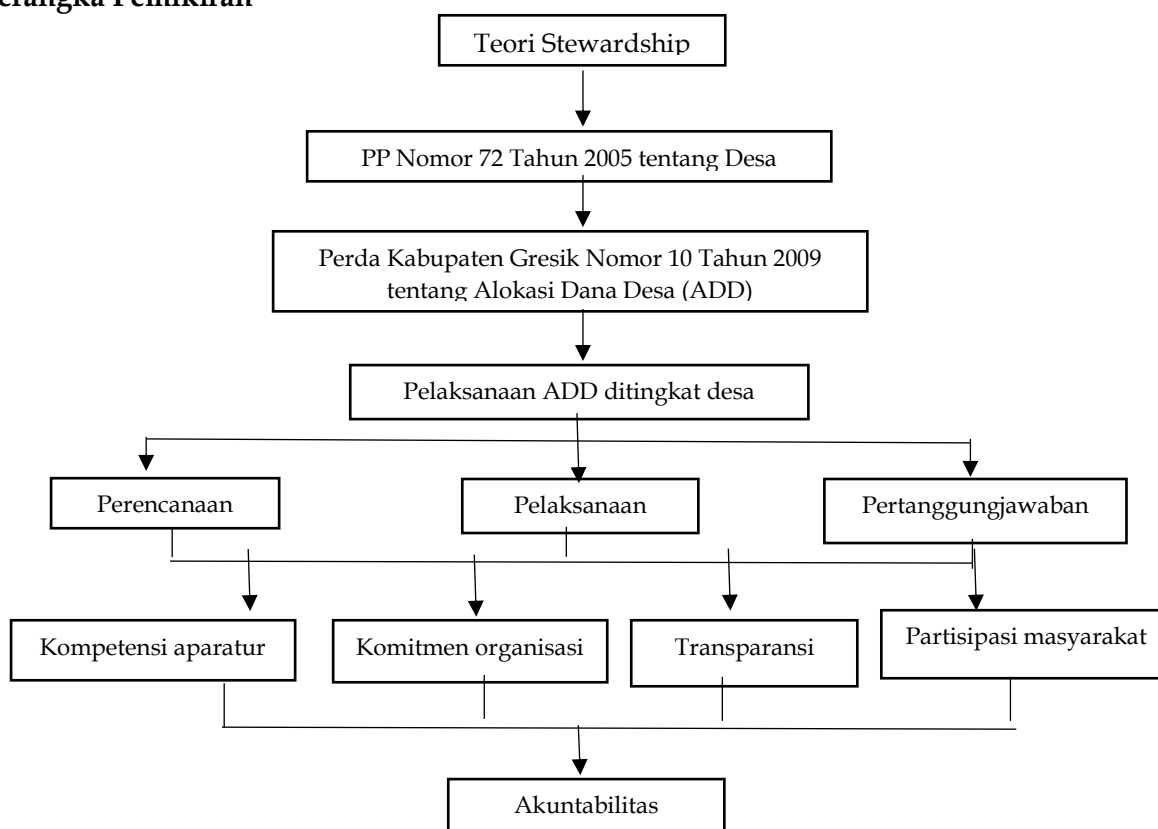
permasalahan, melakukan upaya dalam penyelesaian permasalahan, serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin dan Nurmaeta, 2012).

### Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas lebih menekankan pertanggungjawaban yang lebih luas kepada masyarakat sehingga memunculkan kepercayaan kepada pemerintah. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja seseorang atau pemimpin pada unit organisasi kepada pihak yang berhak atau yang berwenang diberi pertanggungjawaban. Semakin baik suatu sistem akuntansi yang dilakukan akan semakin memberikan informasi yang handal, akurat, dan tepat waktu maka akuntabilitasnya akan semakin baik (Lestari *et al*, 2014)

Pada pemerintahan desa, akuntabilitas sangat berpengaruh penting dalam proses pengelolaan dana desa yang melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan yang berkenaan dengan pembangunan pemerintahan desa (Sumpeno, 2011). Tingkat akuntabilitas dana desa memberi wadah kepada masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif dalam menyelenggarakan pengawasan pembangunan, sehingga proses pembangunan berpotensi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Naimah, 2017). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang diberikan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002)

### Rerangka Pemikiran



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Sumber daya manusia yang baik, kompeten, dan berkualitas akan menghasilkan aparatur yang baik pula, hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, yaitu sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting yang perlu dimiliki aparatur pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan pula dengan dengan teori *stewardship* dimana aparatur yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan yang baik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparatur. Mada, *et al.* (2017), Perdana (2018) dan Irma (2015) sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

$H_1$  : Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Komitmen organisasi merupakan elemen yang sangat penting dalam akuntabilitas (Mada, *et al.* 2017). Aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang baik akan akan pertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan guna mewujudkan pelayanan yang baik agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sejalan pula dengan komitmen organisai yang menjabarkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi setiap individu akan mempengaruhi tingkat kecepatan dan ketepatan kerja yang dimilikinya. Dengan kecepatan dan ketepatan kerja yang dimiliki akan mempengaruhi laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai *prinsipal* Mada, *et al.* (2017), Irma (2015), Fajri, *et al.* (2012), Perdana (2018) sehingga peneliti mengajukan hipotesis :

$H_2$ : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi dianggap sesuatu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah serta pertanggungjawabannya terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan menjelaskan adanya asimetris informasi, yaitu keadaan dimana *prinsipal* tidak memperoleh informasi yang sama dengan *agent*, sehingga dengan adanya transparansi yang tinggi *prinsipal* dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapannya (Putra dan Rasmini, 2019) sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

$H_3$ : Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas dapat diperkuat dengan partisipasi masyarakat. Keputusan yang akan diambil oleh aparatur pemerintah haruslah melibatkan masyarakat, hal ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang menjelaskan bahwa masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan Perdana, 2018 (dalam Handayani, 2006), dari teori ini masyarakat dapat memberikan tanggapan atau respon kepada keputusan pemerintah agar dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi penyalagunaan dana desa atau penyelewengan, dan juga pemerintah agar lebih terbuka dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya Mada, *et al.* (2017), Perdana (2018) dan Arifiyanto dan Kurrohman (2017) sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

$H_4$ : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Menurut Sugiyono (2008), metode kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat dan positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, yang dilakukan secara random. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 330 desa, dan 26 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Sampel dalam penelitian ini adalah teknik *convenience* sampling. *Convenience* sampling merupakan pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Untuk menghasilkan hasil yang akurat, maka diperlukan perhitungan jumlah sampel. Dalam penelitian ini untuk menghitung jumlah sampel yang akurat yaitu dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

dimana:

n : jumlah sampel

N : jumlah dari populasi

e : tingkat presesi yang diharapkan tidak menyimpang 10%

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\ &= \frac{89.100}{1+89.100(0,1)^2} \\ &= 99,8 \text{ (dibulatkan menjadi 100)} \end{aligned}$$

Sampel dalam penelitian ini 20 desa dengan 5 aparatur desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Pemerintahan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Pelaksana teknis desa, dan pelaksana kewilayahan, dengan jumlah responden 100.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan cara disampaikan langsung kepada aparatur desa di Kec.Benjeng, Kab.Gresik, Jawa Timur. Jawaban pada kuesioner tersebut dibatasi berdasarkan skala *likert*, dengan skala 1-5 berdasarkan tingkat kesetujuan responden. Skala *likert* merupakan metode pengukuran sikap dengan menyatakan setuju atau tidaksetujuan terhadap subyek/obyek. Adapaun pengukuran responden menggunakan skala *likert* dijelaskan pada tingkatan sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Normal (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

**Tabel 1**  
**Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

	Dimensi	Indikator
Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Mahmudi, 2011) skala <i>likert</i>	Kejujuran dan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejujuran dan keterbukaan informasi</li> <li>- Kepatuhan dalam pelaporan</li> <li>- Kesesuaian prodesur</li> <li>- Kecukupan informasi</li> <li>- Ketepatan penyampaian laporan</li> </ul>

Kompetensi aparaturnya (Edison <i>et al</i> , 2016) skala <i>likert</i>	Pengetahuan ( <i>knowledge</i> )	- Pengetahuan - Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
	Kemampuan ( <i>skill</i> )	- Keahlian teknis - Kemampuan mencari solusi
	Sikap ( <i>attitude</i> )	- Inisiatif dalam bekerja - Keramahan dan kesopanan
Komitmen organisasi pemerintahan desa (Porter <i>et al</i> , 1974) skala <i>likert</i>	Afektif	- Keyakinan terhadap tujuan organisasi - Perasaan memiliki organisasi
	Keberlanjutan	- Mempertahankan keanggotaan organisasi - Kesetiaan dalam organisasi
	Normatif	- Kesiapan mengerahkan upaya atas nama organisasi
Transparansi (Renggo. B, 2018)	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen	- Pemberian informasi kepada masyarakat - Mengakomodasi usulan/suara rakyat
	Keterbukaan proses	- Pemberian informasi tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa
Partisipasi masyarakat (Heller <i>et al</i> , 1984, dan sujarweni, 2015) skala <i>likert</i>	Pengambilan keputusan	- Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa
	Pelaksanaan anggaran	- Terlibat mengawasi dan melaporkan - Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran - Memberikan penghargaan

Sumber: data primer yang diolah, 2020

## Teknik Analisis Data

### Uji Kualitas Instrumen

#### Uji Validitas

Menurut, Ghazali (2016) uji validitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Pengambilan keputusannya adalah setiap indikator valid apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Untuk menentukan nilai  $r$  hitung dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Dengan Kriteria Pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka kuesioner valid.
- b. Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka kuesioner tidak valid

#### Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Ghazali (2016) merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicoba berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Cara mengukurnya dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dimana pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan program SPSS. Jika nilai *Alpha Cronbach* pada kuesioner  $>$  0,6 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.



### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian, yaitu kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, komitmen organisasi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Rumus Regresi berganda pada penelitian ini adalah:

$$APDD = \alpha + \beta_1 KAP + \beta_2 KO + \beta_3 TR + \beta_4 PM + e$$

Keterangan:

APDD : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien Regresi kompetensi aparatur pengelola dana desa

$\beta_2$  : Koefisien Regresi komitmen organisasi

$\beta_3$  : Koefisien Regresi transparansi

$\beta_4$  : Koefisien Regresi Partisipasi masyarakat

KAP : Kompetensi Aparatur Pengelola dana desa

KO : Kompetensi Organisasi

TR : Transparansi

PM : Partisipasi Masyarakat

e : *Error*

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan menggunakan Uji *Kolmogorof Smirnov* (Uji K-S) dan kurva penyebaran *P-Plot*. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas sedangkan melalui pola penyebaran *P-Plot* yakni jika titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melihat VIF (*Variance Inflating Factor*) dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinearitas (Ghozali, 2016).

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis

### Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima atau variabel tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_1$  diterima. *Probability* sebesar 5% ( $\alpha=0,05$ ) digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun ketentuannya adalah jika  $sig > \alpha (0,05)$ , maka  $H_0$  diterima sedangkan  $H_1$  ditolak dan jika  $sig < \alpha (0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_1$  diterima.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya pengaruh antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Nilai ( $R^2$ ) mempunyai interval antara 0 sampai 1 ( $1 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin besar  $R^2$  (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

### Uji-t

Uji-t digunakan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan mengartikan variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Nilai t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Dalam penelitian digunakan signifikan 5% untuk nilai t.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada perangkat desa yang berada di Kec.Benjeng, Kab.Gresik, Jawa Timur. Penyebaran serta pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 Januari sampai 24 Januari 2020. Kuesioner disebar ke 20 kantor desa yang berada di Kec.Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur.

**Tabel 2**  
**Distribusi Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	100	100%
2.	Kuesioner yang kembali	100	100%
3	kuesioner yang dapat diolah	100	100%
4.	kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0

Sumber: data primer yang diolah, 2020

**Tabel 3**  
**Karakteristik Responden**

No	Karakteristik	Jumlah Responden	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	78	78%
	b. Perempuan	22	22%
	Total	100	100%
2.	Usia		
	a. < 30 Tahun	23	23%
	b. 30-50 Tahun	59	59%
	c. > 50 tahun	18	18%

	Total	100	100%
3.	Pendidikan Terakhir		
	a. SD	-	-
	b. SMP	-	-
	c. SMA	71	71%
	d. S1	27	27%
	e. S2	1	1%
	f. S3	1	1%
	Total	100	100%
4.	Lama Bekerja Diinstansi Pemerintah		
	a. < 5 Tahun	48	48%
	b. 5-10 Tahun	18	18%
	c. >10 tahun	34	34%
	Total	100	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2020

### Uji Kualitas Instrumen

#### Uji Validitas

Apabila suatu instrumen dalam penelitian dikatakan valid maka hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya. Tabel-tabel berikut ini merupakan hasil uji validitas dari variabel dependen dan independen yang meliputi kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas**

No. Butir Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig.(2-Tailed)	Keterangan
KAP1	.762**	.000	Valid
KAP2	.827**	.000	Valid
KAP3	.768**	.000	Valid
KAP4	.675**	.000	Valid
KAP5	.721**	.000	Valid
KAP6	.802**	.000	Valid
KAP7	.756**	.000	Valid
KAP8	.797**	.000	Valid
KAP9	.823**	.000	Valid
KAP10	.811**	.000	Valid
KAP11	.524**	.000	Valid
KO1	.703**	.000	Valid
KO2	.814**	.000	Valid
KO3	.782**	.000	Valid
KO4	.713**	.000	Valid
KO5	.609**	.000	Valid
KO6	.633**	.000	Valid
KO7	.670**	.000	Valid
TR1	.842**	.000	Valid
TR2	.874**	.000	Valid
TR3	.759**	.000	Valid
TR4	.894**	.000	Valid
TR5	.841**	.000	Valid
TR6	.854**	.000	Valid
TR7	.837**	.000	Valid
PM1	.860**	.000	Valid
PM2	.903**	.000	Valid
PM3	.906**	.000	Valid
PM4	.891**	.000	Valid
APDD1	.821**	.000	Valid
APDD2	.773**	.000	Valid
APDD3	.733**	.000	Valid
APDD4	.687**	.000	Valid
APDD5	.807**	.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

### Uji Reliabilitas

**Tabel 5**  
Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
KAP	0,774	0,939	11
KO	0,770	0,885	7
TR	0,770	0,885	7
PM	0,839	0,950	4
APDD	0,791	0,893	5

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur apakah jawaban dari responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner tetap konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur. Maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dinyatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

### Uji Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 6**  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
APDD	100	16	25	22,03	2,713
KAP	100	40	55	49,10	4,713
TR	100	23	35	31,04	3,357
PM	100	4	20	13,13	4,009
KO	100	21	35	29,17	3,493
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian ini, deskriptif variabel yang menyimpulkan bahwa, pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (APDD) memiliki nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum 25,00, sedangkan untuk nilai mean sebesar 22,03 dan nilai standart deviasinya sebesar 2,713. Pada variabel kompetensi aparatur pengelola dana desa (KAP) memiliki nilai minimum sebesar 40,00 dan nilai maksimum 55,00, sedangkan untuk nilai mean sebesar 49,10 dan nilai standart deviasinya sebesar 4,713. Pada variabel transpareansi (TR) memiliki nilai minimum sebesar 23,00 dan nilai maksimum sebesar 35,00 sedangkan untuk nilai mean sebesar 31,04 dan nilai standart deviasinya sebesar 3,357. Pada variabel partisipasi masyarakat (PM) memiliki nilai minimum sebesar 4,00 dan nilai maksimum sebesar 20,00 sedangkan untuk nilai mean sebesar 13,13 dan nilai standart deviasinya sebesar 4,009. Pada variabel komitmen organisasi (KO) memiliki nilai minimum sebesar 21,00 dan nilai maksimum sebesar 35,00, sedangkan untuk nilai mean sebesar 29,17 dan nilai standart deviasinya sebesar 3,493.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 7**  
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF

(Constant)	3.639	2.439		1.492	.139		
KAP	.211	.068	.367	3.089	.003	.440	2.275
KO	.152	.089	.196	1.719	.049	.479	2.089
TR	.126	.088	.156	1.431	.156	.523	1.911
PM	-.026	.054	-.039	-.487	.628	.992	1.008

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Dari data di atas didapat model persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$APDD = 3,639 + 0,211KAP + 0,152KO + 0,126TR - 0,026PM + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

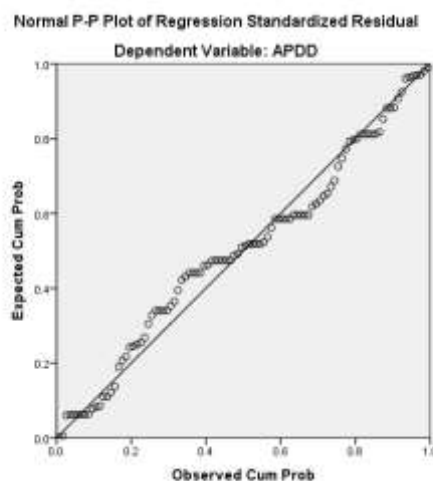
1. Konstanta ( $\alpha$ )  
Konstanta ( $\alpha$ ) adalah intersep dari Y apabila  $X=0$ , menunjukkan apabila variabel independen yang terdiri dari kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat bernilai 0 maka variabel minat bernilai 3,639.
2. Koefisien Regresi Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (KAP)  
Kompetensi aparatur pengelola dana desa menunjukkan nilai sebesar 0,211. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa memiliki arah positif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi kompetensi aparatur pengelola dana desa maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Koefisien Regresi Komitmen Organisasi (KO)  
Komitmen organisasi menunjukkan nilai sebesar 0,152. Maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi memiliki arah positif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Koefisien Transparansi (TR)  
Transparansi menunjukkan nilai sebesar 0,126. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki arah positif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi transparansi maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Koefisien Regresi Partisipasi Masyarakat (PM)  
Partisipasi masyarakat menunjukkan nilai sebesar -0,026. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki arah negatif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

##### a. Uji Grafik Normal *Probability Plot (P-Plot)*

Kriteria dalam uji grafik *Probability plot* adalah titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka pola distribusi tersebut dapat dikatakan normal.



Gambar 2  
 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot  
 Sumber: data primer yang diolah, 2020

b. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Tabel 8  
 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.08465801
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.082
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 <sup>c</sup>

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov di atas maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan angka 0,054 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam uji normalitas data dengan menggunakan grafik *probability plot*, dan uji kolmogorov smirnov bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak digunakan karena telah memenuhi kriteria atau asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

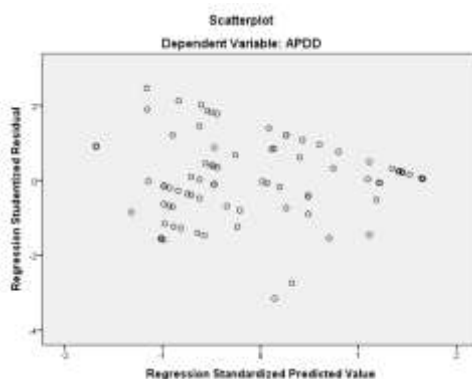
Tabel 9  
 Hasil Uji Multikolinearitas

	Tolerance	VIF
(Constant)		
KAP	.440	2.275
KO	.479	2.089
TR	.523	1.911
PM	.992	1.008

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9 dapat dijabarkan bahwa nilai tolerance dari kompetensi aparatur pengelola dana desa sebesar 0,440, komitmen organisasi sebesar 0,479, transparansi sebesar 0,523, partisipasi masyarakat sebesar 0,992. Dengan penjabaran pada tabel 9 nilai *tolerance* lebih dari 0,1 serta nilai VIF pada masing-masing variabel menunjukkan nilai kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

**Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
 Sumber: data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat dijabarkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa grafik scatterplot membuktikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Uji Hipotesis**  
**Uji F**

**Tabel 10**  
**Hasil Uji-F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	298.676	4	74.669	16.488	.000 <sup>b</sup>
	Residual	430.234	95	4.529		
	<b>Total</b>	<b>728.910</b>	<b>99</b>			

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga variabel kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.640 <sup>a</sup>	.410	.385	2.128	1.183

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 11 hasil koefisien determinasi diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,410 atau 41% yang berarti variabel bebas yang terdiri dari kompetensi aparatur pengelola dana desa (KAP), komitmen organisasi (KO), transparansi (TR), partisipasi masyarakat (PM) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (APDD) memiliki kontribusi sebesar 41% sedangkan sisanya (100%-41%=59%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model regresi tersebut.

## Uji-t

**Tabel 12**  
**Hasil Uji-t**

Variabel	T	Sig.	Keterangan
KAP	3,089	0,003	Berpengaruh
KO	1,719	0,049	Berpengaruh
TR	1,431	0,156	Tidak Berpengaruh
PM	-0,487	0,682	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa:

- Kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan t hitung sebesar 3,089 dan nilai signifikan sebesar 0,003 dengan  $\alpha < 0,05$  sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
- Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan t hitung sebesar 1,719 dan nilai signifikan sebesar 0,0049 dengan  $\alpha < 0,05$  sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
- Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan t hitung sebesar 1,431 dan nilai signifikan sebesar 0,156 dengan  $\alpha > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan t hitung sebesar -0,487 dan nilai signifikan sebesar 0,682 dengan  $\alpha > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

## Pembahasan

### Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data pada Tabel 12 di atas dapat dijelaskan bahwa t hitung sebesar 3,089 dengan nilai signifikan sebesar 0,003. Artinya dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang dijelaskan bahwa eksekutif sebagai pengelola memiliki peran yang penting dalam pencaian tujuan organisasi dimana ia bekerja. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa diperlukan kesiapan-kesiapan yang memadai salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Joko (2005), menyatakan bahwa kinerja individu dapat optimal jika individu-individu tersebut memiliki kompetensi yang dapat diandalkan di bidangnya. Keandalan kompetensi aparatur juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu seperti kompetensi pemecahan masalah, kompetensi interaksi dengan orang lain, kompetensi kerja tim. Hasil pengujian ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya, Mada, *et al.* (2017) dan Irma (2015), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi pemerintah desa disebabkan oleh lemahnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa itu sendiri.



### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan pada Tabel 12 di atas dapat dijelaskan bahwa  $t$  hitung sebesar 1,719 dan nilai signifikan sebesar 0,049. Artinya dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa perlu kepercayaan dan tanggungjawab yang tinggi, hal tersebut harus dimiliki oleh seluruh aparatur desa dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada dalam organisasi. Menjalankan tugas dengan baik harus didukung dengan perhatian yang baik terhadap organisasi. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* merupakan salah satu cabang ilmu psikologi dan sosiologi dan untuk menguji kondisi dimana eksekutif sebagai pengelola yang temotivasi untuk melakukan yang terbaik terhadap kepentingan utama organisasi.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mada, *et al.* (2017), Irma (2015) dan Fajri, *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi, maka komitmen individu-individu dalam organisasi menjadi sangat penting. Jika seorang individu komit dengan sasaran tertentu maka hal ini akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi kinerjanya (Suartana, 2010). Zeyn (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan dalam akuntabilitas keuangan.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Tabel 12 di atas dapat dijelaskan bahwa  $t$  hitung 1,431 dengan nilai signifikan 0,156. Artinya dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam hal ini teori keagenan yaitu kontrak kerja antar perangkat desa (*agent*) dengan masyarakat desa (*principal*) dalam pemerintahan desa, kepala desa sebagai *agent* dan masyarakat desa sebagai *principal*. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu informasi keuangan maupun informasi kebijakan yang diambil pemerintah serta menjamin akses bagi masyarakat atau setiap orang dalam memperoleh informasi tersebut.

Dalam penelitian ini transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian transparansi yang kurang baik dapat menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Gresik. Informasi yang diberikan pemerintah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi dapat diharapkan akan menjangkau setiap lapisan masyarakat akan pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019) dan Ummami dan Nurroddin (2017) menyatakan bahwa implementasi dari prinsip transparansi memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi transparansi maka cenderung semakin baik pula informasi yang didapatkan setiap orang dalam mengetahui keandalan informasi tersebut.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Tabel 12 di atas dapat dijelaskan bahwa  $t$  hitung sebesar -0,487 dengan nilai signifikan sebesar 0,682. Artinya dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam hal ini teori *stewardship* yaitu aparatur yang diberi tugas dan tanggungjawab harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk laporan yang akuntabel sesuai dengan aturan sehingga dengan terlibatnya masyarakat dalam memantau dan menilai pengelolaan dana desa akan mengurangi tingkat kesalahan dan kecurangan atau penyelewengan yang akan dilakukan oleh aparatur.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mada, *et al.* (2017) dan Arifiyanto dan Kurrohman (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini kuesioner yang dibagikan serta pernyataan yang diajukan cenderung lebih menjadikan individu itu sendiri tidak berinteraksi dengan masyarakat secara penuh. Sehingga partisipasi masyarakat kurang produktif dalam hal pencarian informasi tentang pengelolaan dana desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan data dan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat dibuktikan pada hasil uji-t yang menyatakan bahwa variabel kompetensi aparatur pengelola dana desa menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar 3,089 dan nilai signifikan sebesar 0,003. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat dibuktikan pada hasil uji-t yang menyatakan bahwa variabel komitmen organisasi menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar 1,719 dan nilai signifikan sebesar 0,049. Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat dibuktikan pada hasil uji-t yang menyatakan bahwa variabel transparansi menunjukkan nilai  $t$  hitung dari sebesar 1,431 dengan nilai signifikan sebesar 0,156. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat dibuktikan pada hasil uji-t yang menyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar -0,487 dengan nilai signifikan sebesar 0,682.

### Saran

Berdasarkan simpulan yang didapatkan dan dijelaskan di atas, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian, tidak hanya pada Kec. Benjeng, Kab. Gresik saja tetapi tempat atau wilayah lain yang juga perlu untuk diteliti dan juga untuk menambah variabel lain diluar penelitian ini. Misal pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan, kejelasan sasaran anggaran, dan beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menyebar kuesioner saja tetapi juga diikuti dengan wawancara secara langsung kepada responden agar lebih mendapatkan hasil yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F., dan T. Kurrohman. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(3):481-493.
- Donaldson, L., dan J. H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management* 16(1):49-64.
- Edison, E., Y. Anwar., dan I. Komariyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Fajri, R., E. Setyowati., dan Siswidiyanto. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurusan Administrasi Publik* 3:1099-1104.
- Gatra, S. 2019. Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all>. 22 Oktober 2019 (10.30).
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Handayani, S. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Cetakan Pertama. Surakarta Kompip. Solo.
- Heller, K., R.H. Price, S. Reinharz, S. Riger, dan A. Wandersman. 1984. *Psychology and Community Change: Challenges of the future (2nd ed.)*. Homewood, II. Dorsey.
- Hevesi, G. A. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. [www.osc.state.ny.us](http://www.osc.state.ny.us).
- Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis* 3(1):121-137.
- Joko, J. P. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Pembangunan RI. 2000. *Akuntabilitas*. Jakarta.
- Lestari, A. K. D., dkk. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kututambahan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintah). *E-Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. 2(1).
- Mada, S., L. Kalangi, dan H. Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 106-115.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mathis, R. dan J. Jacson,. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Muslimin, M. dan St. Nurmaeta. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkalan Kabupaten Jenepono. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2.
- Nadir. 2013. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik* 1(1).
- Naimah. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis*. Sumatera Utara.
- Perdana, K. W. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Program Studi Akuntansi*.
- Porter, L.W., R. M. Steers., R. T. Mowday. dan P. V. Boulian,. 1974. Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric Technicians. *Journal of Applied Psychology* 59:603-609.
- Putra, I. M. Y. D. dan N. K. Rasmini,. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 28(1):132-158.
- Renggo, B. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kalapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi 2. Banda Aceh.
- Suartana, I. W. 2010. *Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi*. Andi. Yogyakarta.

- Syaifudin, N. 2019. Peradi Gresik Siap Beri Pendampingan Hukum Kades. <https://www.bangsaonline.com/berita/59265/peradi-gresik-siap-beri-pendampingan-hukum-kades>. 22 Oktober 2019. (11:15).
- Umami, R. dan I. Nurodin,. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. Jakarta.  
\_\_\_\_\_. Nomor 6 Tahun 2014. *Pemerintah Desa* Jakarta.
- Wazir. A. W., dkk. 1999. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekertariat Bina Desa.
- Zeyn, E. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitemen Anggaran sebagai pemoderasi*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 1:21-3